

RENCANA KERJA 2020

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA 2020 BPPHLHK KALIMANTAN

Diterbitkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Jalan P. Untung Surapati, Kompleks BDLHK, Sungai Kunjang. Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di tahun 2020

Rencana Kerja 2020 ini memuat hasil diskusi dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Dokumen ini dapat diunduh melalui tautan:



<http://bit.ly/renjagakkumkalimantan20klhk>

DAFTAR ISI

	HAL
Daftar Isi	i
Pranala	ii
BAB I PENDAHULUAN	HAL
Latar Belakang	1
Kondisi Umum	2
Kondisi Khusus	3
Struktur Organisasi	5
Sumber Daya Manusia	5
Sumber Dana	6
Potensi dan Permasalahan	7
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017-2019 & PROGNOSIS TAHUN 2020	HAL
Capaian dan Prognosis	9
Kinerja Program 2017-2019	
BAB III RENCANA KERJA 2020	HAL
Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional	12
Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan	13



BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	26



PRANALA



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 disusun dalam rangka meningkatkan serta memantapkan pengelolaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkum KLHK Kalimantan) dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: P.12/PHLHK/SET/REN.0/12/2019 Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

Rencana Kerja ini memuat target dan berbagai upaya untuk memenuhi capaian kinerja yang bermuara pada tercapainya Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari Balai Gakkum KLHK Kalimantan.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman dan arahan umum dalam mengaktualisasi kerja-kerja penegakan hukum di Balai Gakkum KLHK Kalimantan. Oleh sebab itu, perlu peran serta seluruh jajaran dan personil Gakkum KLHK Kalimantan untuk mengawal dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ini.

Harapan selanjutnya adalah dapat tercapainya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dan personil Gakkum KLHK Kalimantan dalam mencapai output kinerja setiap tahunnya.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan



Subhan
Subhan, S.Hut, M.Si.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan suatu Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka terbentuklah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

- Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
- Penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- Penyelidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peegakan hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program penurunan gangguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan, maka Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan membuat suatu acuan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan. Sehingga, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan pada setiap awal Tahun membuat Rencana Kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

B. KONDISI UMUM

Balai Gakkum KLHK Kalimantan berpusat di Kota Samarinda yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Balai Gakkum KLHK Kalimantan terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi Wilayah, diantaranya:

- Seksi Wilayah I, berpusat di Kota Palangkaraya dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Seksi Wilayah II, berpusat di Kota Samarinda dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Seksi Wilayah III, berpusat di Kota Pontianak dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi dari segi manajemen, administrasi, dan organisasi dari setiap seksi relatif sama, karena masih dalam satu kontrol oleh Balai Gakkum KLHK Kalimantan. Namun, untuk kondisi lingkungan hidup dan hutan di setiap wilayah kerja seksi-seksi tersebut relatif berbeda. Untuk Seksi Wilayah I, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan akses ke lokasi kerja lebih didominasi dengan sungai. Selanjutnya, pada Seksi Wilayah II didominasi oleh kegiatan pertambangan dan Hutan Tanaman Industri. Untuk Seksi Wilayah III, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Pada segi manajemen, administrasi, dan organisasi, Balai Gakkum KLHK Kalimantan telah mendelegasikan kepada setiap seksi-seksi wilayahnya untuk melaksanakan kewenangannya masing-masing. Delegasi tersebut dapat berbentuk surat menyurat, perencanaan kegiatan masing-masing seksi serta penanganan sarana dan prasarana pada setiap seksi wilayah.

Kondisi-kondisi di atas merupakan aspek utama dalam kegiatan penegakan hukum oleh Balai Gakkum KLHK Kalimantan, yang secara garis besar meliputi:

- Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan layanan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup dan kehutanan;
- Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
- Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
- Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

C. KONDISI KHUSUS

Balai Gakkum KLHK Kalimantan memiliki beberapa permasalahan yang sering menjadi kegiatan rutin dalam penanganan kasus hukum antara lain: kegiatan Illegal Logging disebabkan Wilayah Kalimantan masih didominasi oleh Hutan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta kegiatan pertambangan ilegal yang marak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2020 ini ada beberapa program yang akan menjadi kegiatan prioritas utama Balai Gakkum KLHK Kalimantan, antara lain:

Pertama, kegiatan LHK di perbatasan negara: Kalimantan Utara-Sabah dan Kalimantan Barat-Serawak.

Kedua, penanganan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;

Ketiga, Illegal Logging di perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Keempat, Kasus-kasus pidana Lingkungan Hidup.

Kelima, Peningkatan kualitas penanganan Kasus di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Keenam, Penanganan Kasus LHK di lokasi yang direncanakan menjadi Ibukota Negara.

Gakkum KLHK sangat penting, dalam pengelolaan SDA dan LH, yaitu:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip *polluter pays principle* di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

Tipologi Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2020-2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi Grk Dari 5 Sektor 3. Penurunan Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 5. Jumlah Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi / High Conservation Values;
Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan (SS2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan Terhadap PDB Nasional 2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, Tsl, Dan Bioprospecting 3. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Lingkungan Hidup & Kehutanan
Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat hutan yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan (SS3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan 2. Luas Kawasan Hutan Yang Dilepas Untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/Tora 3. Luas Hutan Yang Di Kelola Masyarakat
Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing (SS4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Kebijakan LHK 2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Perairan 3. Penyelesaian Kasus Bidang LHK 4. Sistem Data Dan Informasi Yang Valid Dan Mudah Diakses 5. Hasil Litbang Yang Inovatif Dan Implementati 6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK 7. Opini WTP Atas Laporan Keuangan KLHK 8. Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM LHK 9. Level Maturitas SPIP KLHK

Di Tahun 2019-2024, Balai Gakkum KLHK Kalimantan mendukung Sasaran Strategis 4 (Empat), yaitu Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing khususnya di dalam Indikator Kinerja Utama 3 (Tiga) Yaitu Penyelesaian Kasus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum berada di Samarinda, sedangkan Seksi Wilayah I Palangkaraya, Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Kalimantan Selatan, sedangkan Seksi Wilayah II Samarinda wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Seksi Wilayah III Pontianak Wilayah Kerja Provinsi Kalimantan Barat.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya manusia, adapun sumber daya manusia yang dimiliki pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

UNIT KERJA

JUMLAH KESELURUHAN 191 PEGAWAI

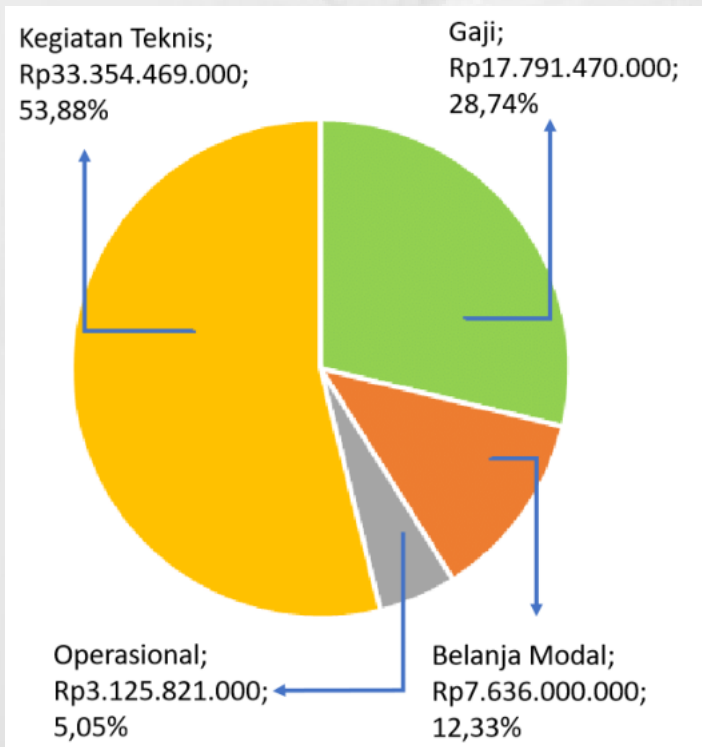
1. Kantor BPPHLHK Wilayah Kalimantan mempunyai pegawai berjumlah 16 orang, dengan rincian:
 - Kepala Balai 1 orang
 - Kasubag 1 orang
 - Staf 4 orang
 - PPLH 1 orang
 - Pengadaan 1 orang
 - Tenaga Kontrak 8 orang
2. Kantor Seksi Wilayah I Palangkaraya mempunyai pegawai berjumlah 52 orang, dengan rincian:
 - Kepala Seksi 1 orang
 - Polisi Kehutanan 41 orang
 - PPLH 3 orang
 - Staf 1 orang
 - Tenaga Kontrak 6 orang

3. Kantor Seksi Wilayah II Samarinda mempunyai pegawai berjumlah 64 orang, dengan rincian:
 - Kepala Seksi 1 orang
 - Polisi Kehutanan 46 orang
 - PPLH 8 orang
 - Staf 2 orang
 - Tenaga Kontrak 7 orang

4. Seksi Wilayah III Pontianak mempunyai pegawai berjumlah 59 orang, dengan rincian:
 - Kepala Seksi 1 orang
 - Polisi Kehutanan 47 orang
 - PPLH 4 orang
 - Staf 1 orang
 - Tenaga Kontrak 6 orang

F. SUMBER DANA

Dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar Rp.61.907.760.000. Adapun uraian Pembagian Pagu Anggaran sesuai jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



G. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Gakkum KLHK Kalimantan memiliki faktor-faktor yang dapat menjadi potensi dalam penegakan hukum namun dalam saat yang bersamaan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal. Adapun identifikasi potensi dan permasalahan, sebagai berikut:

INTERNAL

1. Potensi

- Balai BPPHLHK Wilayah Kalimantan memiliki tugas dan fungsi serta wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi lebih luas sebagai implikasi dari bergabungnya dua kementerian menjadi kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang-undang yang berkenaan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.
- Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi dari bergabungnya dua kementerian menjadi kementerian LHK.
- Sumberdaya aparatur pada tingkat tapak sudah mendukung penerapan penegakan hukum.

2. Permasalahan

- Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum memadai dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus diatasi. Jumlah PPNS dan PPLH belum cukup untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pidana.
- Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, antara lain data/informasi yang berkenaan dengan izin-izin usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme whistle blower, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi.
- Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan "multidoors" masih terkendala oleh kapasitas operasionalisasinya, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat lapangan.
- Kinerja yang masih belum memadai untuk mengefektifkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja, terutama dengan Ditjen-Ditjen yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan menetapkan aturan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

EKSTERNAL

1. Potensi

- Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Kapasitas penegakan hukum sebagai salah satu elemen komposit dari indeks tata kelola kehutanan. Dengan demikian maka penegakan hukum sebagai salah satu factor kunci keberhasilan pengelolaan kehutanan.
- Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan eksekusi publik yang besar pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Permasalahan

- Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas pelaksanaan.
- Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas kawasan hutan dan lahan, dst.
- Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara "pusat dan daerah" perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.
- Besarnya harapan rakyat akan keadilan, kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan hukum perlu diantisipasi. Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar terhadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara illegal. Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang cenderung meningkat.

BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017-2019 & PROGNOSIS TAHUN 2020

A. CAPAIAN DAN PROGNOSIS KINERJA PROGRAM 2017-2020

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj), yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2019 ini, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan memiliki 4 (empat) sasaran kinerja yang akan dicapai dan diukur melalui beberapa indikator kinerja. Adapun sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 5 Provinsi
2. Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi
3. Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Berikut disajikan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan selama periode Tahun 2018 yang kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui berhasil atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Tahun 2018 disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 5 Provinsi

Indikator Kinerja Kegiatan

Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi

	2017	2018	2019	2020
Target	720.000 Ha	880.000 Ha	450.000 Ha	375.000 Ha
Capaian	700.000 Ha	916.140 Ha	1.063.709,83 Ha	-

RENCANA KERJA 2020 BPPHLHK KALIMANTAN

2. Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Pengaduan yang masuk tertangani

	2017	2018	2019
Target	75 Pengaduan	100 Pengaduan	150 Pengaduan
Capaian	50 Pengaduan	119 Pengaduan	213 Pengaduan

- b. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan

	2017	2018	2019
Target	20 Izin	80 Izin	75 Izin
Capaian	80 Izin	387 Izin	185 Izin

Pada Tahun 2020 ini, target dan capaian untuk Pengaduan yang masuk tertangani serta Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan dijadikan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu dengan Target **172 Perusahaan**.

3. Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional

Indikator Kinerja Kegiatan

- a. Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21

	2017	2018	2019	2020
Target	12 Kasus	15 Kasus	33 Kasus	42 Kasus
Capaian	39 Kasus	47 Kasus	44 Kasus	-

RENCANA KERJA 2020 BPPHLHK KALIMANTAN

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Layanan Dukungan Manajemen Satker

	2017	2018	2019	2020
Target	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Capaian	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-

b. Layanan Perkantoran

	2017	2018	2019	2020
Target	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Capaian	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-



BAB III RENCANA KERJA 2020

A. STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KLHK DAN PRIORITAS NASIONAL

Rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015–2019 (selanjutnya disingkat menjadi RPJMN 2015–2019) telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Oleh karena seluruh aktifitas pembangunan diarahkan untuk memenuhi visi dan misi Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2015–2019, maka visi dan misi Kementerian LHK adalah sama dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, demikian pula halnya dengan seluruh unit kerja dibawah kementerian LHK, termasuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (disingkat Ditjen PHLHK).

Sasaran Strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu Tahun 2015–2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK 2015–2019 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat;
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian tiga Sasaran strategis Kementerian LHK 2015–2019 tersebut di atas akan dilakukan melalui 13 Program. Satu diantara 13 Program termaksud di atas, adalah “Program Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”.

Sasaran Program dari “Program Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” ini secara substantif terdiri atas dua sub sasaran Program, yang masing-masingnya memiliki satu indikator Kinerja Program.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor; P.78/MenLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 (Tiga) dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai yang tertera pada Pasal 1 yaitu :

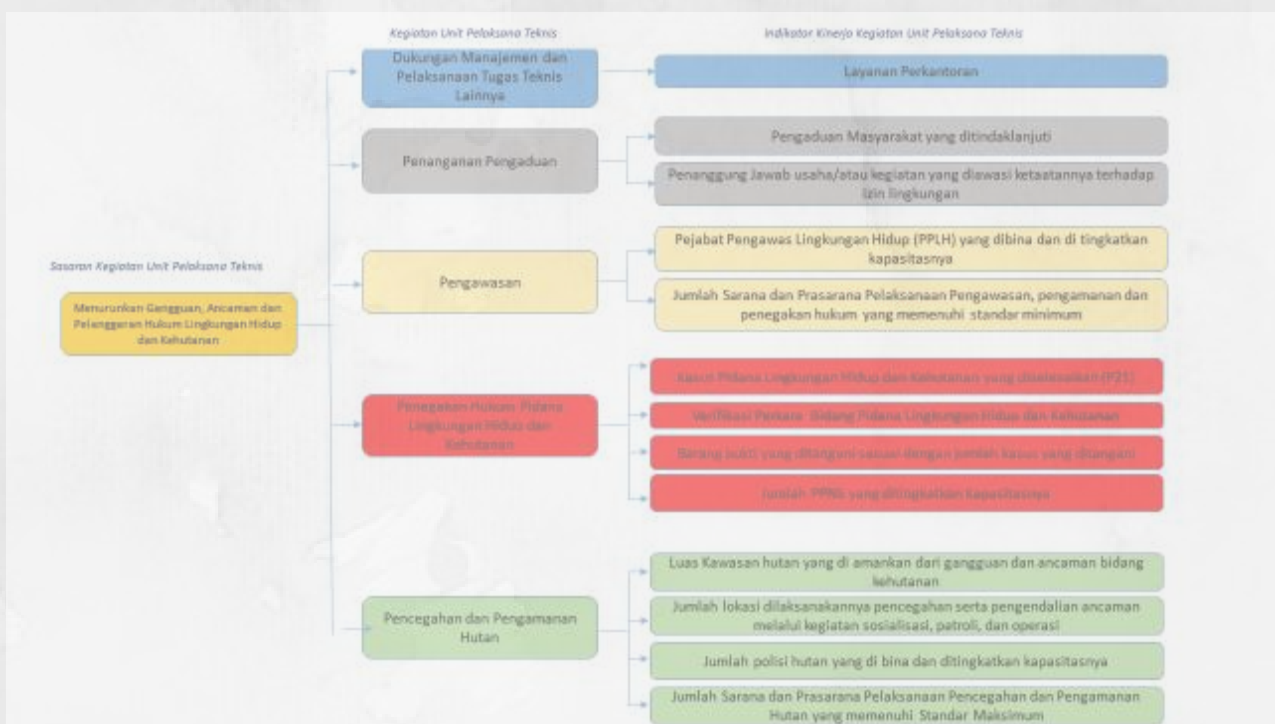
- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018 berada pada rentang 66,5–68,6 (IKU I);
- b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak dari produksi barang dan jasa hutan dan lingkungan hidup pada tahun 2019 sebesar 3,9 Triliun (IKU II);
- c. Jumlah Kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas pengelolaan minimal 70 pada Tahun 2019 sebanyak 260 Unit (IKU IV);

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang akan digunakan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian.

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan merupakan unit Pelaksana Teknis Dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah **"Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan"**

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan. Oleh karena itu perlu di tetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, dimana kegiatan dan target nya akan di pengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah di tahun tahun ke depan, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis akan Sinergis dengan Kegiatan di Pusat dengan Hasil Koordinasi Kegiatan untuk Menentukan Target Per Lokasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat pada gambar berikut.



Untuk mencapai sasaran tersebut di atas maka dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA 2020 BPPHLHK KALIMANTAN

Dalam rangka untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut di atas disusun rencana kerja yang terdiri dari beberapa indikator kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan dari Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan, sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan	375.000 Hektar
		Jumlah Operasi Hasil Hutan Illegal	20 Operasi
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Usaha/Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Bidang LHK	172 Perusahaan
		Pengaduan yang Masuk Tertangani	
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Tindak Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P21	42 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	4 Orang

INDIKATOR KEGIATAN KALIMANTAN 2020 (Anggaran Rp.61.907.760.000)

No	Uraian	Target	Alokasi Pagu
1	Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	375.000 Hektar	7.840.640.000
2	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	20 Operasi	10.905.329.000
3	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	172 Perusahaan	6.619.500.000
4	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	42 Kasus	12.655.000.000
5	Kapasitas PPNS LHK yang Ditingkatkan	4 Orang	1.720.000.000
6	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1.250.000.000
7	Layanan Perkantoran	1 Layanan	20.917.291.000

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Penyusunan RKAKL	99.500.000
2	Rapat Pembahasan Usulan RKAKL	168.000.000
3	Koordinasi dan Konsultasi Rencana Program dan Anggaran	282.000.000
4	Penyusunan Rencana Kerja	500.000
5	Evaluasi Program dan Anggaran	215.000.000
6	Penyusunan Laporan Kinerja	300.000
7	Penyusunan Laporan Tahunan	300.000
8	SPIP	9.400.000
9	Penyusunan Laporan Keuangan	55.000.000
10	Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	220.000.000
11	Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Kepegawaian	200.000.000
TOTAL		1.250.000.000



b. Kegiatan Layanan Perkantoran

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.791.470.000
2	Operasional Perkantoran	1.387.291.000
3	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	320.540.000
4	Langganan Daya dan Jasa	379.080.000
5	Penguatan Kelembagaan	147.000.000
6	Biaya Pemeliharaan	891.910.000
TOTAL		20.917.291.000



2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah I	248.400.000
2	Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah II	270.800.000
3	Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah III	254.800.000
4	Pengumpulan Data dan Informasi ke Stakeholder	173.000.000
5	Intelijen	94.650.000
6	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah I	843.000.000
7	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah II	1.026.200.000
8	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Seksi Wilayah III	913.800.000
9	Koordinasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	594.000.000
10	Operasional Kegiatan Pengamanan	78.000.000
11	Operasi Gabungan Seksi Wilayah I	468.380.000
12	Operasi Gabungan Seksi Wilayah II	510.480.000
13	Operasi Gabungan Seksi Wilayah III	480.380.000
14	Operasi Fungsional Seksi Wilayah I	564.750.000
15	Operasi Fungsional Seksi Wilayah II	702.150.000
16	Operasi Fungsional Seksi Wilayah III	617.850.000
17	Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah I	217.350.000
18	Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah II	236.950.000
19	Pengumpulan Data dan Informasi Seksi Wilayah III	222.950.000
20	Pengumpulan Data dan Informasi ke Stakeholder	173.000.000
21	Intelijen	94.650.000
22	Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah I	335.050.000
23	Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah II	370.050.000
24	Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah III	345.050.000
25	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah I	268.040.000
26	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah II	296.040.000
27	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah III	276.040.000
28	Konsolidasi Data dan Informasi Ancaman Gangguan Keamanan Bidang Kehutanan	180.000.000
29	Konsolidasi Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	330.000.000
30	Pelatihan Menembak Seksi Wilayah I	68.175.000
31	Pelatihan Menembak Seksi Wilayah II	77.705.000
32	Pelatihan Menembak Seksi Wilayah III	73.990.000
33	Peningkatan Kapasitas Petugas	77.000.000
34	Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah I	24.015.000
35	Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah II	26.385.000
36	Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah III	25.200.000
37	Penyegaran Polhut	418.289.000
38	Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah I	19.400.000
39	Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah II	22.400.000
40	Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah III	19.400.000
41	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah I	12.750.000
42	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah II	18.200.000
43	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api Seksi Wilayah III	15.550.000
44	Operasional Satgas Patroli Siber Perdagangan TSL Online	100.000.000
TOTAL		12.184.269.000



3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Penanganan Pengaduan Perusahaan Seksi Wilayah I	309.600.000
2	Penanganan Pengaduan Perusahaan Seksi Wilayah II	368.280.000
3	Penanganan Pengaduan Perusahaan Seksi Wilayah III	316.800.000
4	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan	84.320.000
5	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pengaduan	450.000.000
6	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi Wilayah I	361.800.000
7	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi Wilayah II	390.150.000
8	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi Wilayah III	369.900.000
9	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Kerusakan Hutan dan Karhutla	25.650.000
10	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa Seksi Wilayah I	814.400.000
11	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa Seksi Wilayah II	1.462.000.000
12	Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Sektor Industri, Prasarana dan Jasa Seksi Wilayah III	825.200.000
13	Uji Laboratorium Pengawasan	237.000.000
14	Koordinasi dan Konsultasi bidang PPSA	550.000.000
TOTAL		6.565.100.000



RENCANA KERJA 2020 BPPHLHK KALIMANTAN



RENCANA KERJA 2020 BPPHLHK KALIMANTAN



4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kegiatan Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P21

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah I	429.900.000
2	Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah II	503.200.000
3	Pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah III	441.900.000
4	Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Seksi Wilayah I	205.700.000
5	Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Seksi Wilayah II	228.800.000
6	Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Seksi Wilayah III	212.300.000
7	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II) Seksi Wilayah I	365.400.000
8	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II) Seksi Wilayah II	385.000.000
9	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II) Seksi Wilayah III	371.000.000
10	Operasional Penyidikan Seksi Wilayah I	1.556.320.000
11	Operasional Penyidikan Seksi Wilayah II	1.686.660.000
12	Operasional Penyidikan Seksi Wilayah III	1.593.560.000
13	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah I	84.000.000
14	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah II	84.000.000
15	Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah III	84.000.000
16	Honorarium Persidangan	378.000.000
17	Pemantauan Persidangan	420.000.000
18	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah I	805.380.000
19	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah II	805.500.000
20	Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK Seksi Wilayah III	805.380.000
21	Koordinasi Penanganan Barang Bukti Pidana LHK	270.000.000
22	Rakor PPNS Multidoor Regional Kalimantan	496.200.000
23	Penguatan Tugas dan Fungsi Penanganan Hukum Pidana	170.000.000
24	Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK	88.000.000
25	Press Release	184.800.000
26	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK	80.000.000
27	Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kapasitas PPNS	50.000.000
28	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	363.000.000
29	Koordinasi dan Konsultasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK	127.000.000
TOTAL		13.275.000.000



5. Kegiatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK yang Memenuhi Standar Minimum (Rp7.716.100.000)

No.	URAIAN	ANGGARAN	WAKTU
B	Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan	419.300.000	
1	Sarana Prasarana Balai	15.500.000	Maret
2	Sarana Prasarana Seksi Wilayah I	141.450.000	Agustus – September
3	Sarana Prasarana Seksi Wilayah II	207.750.000	April
4	Sarana Prasarana Seksi Wilayah III	54.600.000	April
C	Pengadaan Sarana Prasarana Pengawasan	54.400.000	
1	Operasional Pengawasan Seksi Wilayah I	18.100.000	Oktober
2	Operasional Pengawasan Seksi Wilayah II	18.200.000	Maret
3	Operasional Pengawasan Seksi Wilayah III	18.100.000	April
D	Pengadaan Sarana Prasarana Penyidikan	939.000.000	
1	Sarana Prasarana Balai	130.300.000	April
2	Sarana Prasarana Seksi Wilayah I	412.400.000	Februari
3	Sarana Prasarana Seksi Wilayah II	135.200.000	April
4	Sarana Prasarana Seksi Wilayah III	261.100.000	Juni - Juli
B	Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan	419.300.000	
1	Sarana Prasarana Balai	15.500.000	Maret
2	Sarana Prasarana Seksi Wilayah I	141.450.000	Agustus – September
3	Sarana Prasarana Seksi Wilayah II	207.750.000	April
4	Sarana Prasarana Seksi Wilayah III	54.600.000	April
C	Pengadaan Sarana Prasarana Pengawasan	54.400.000	
1	Operasional Pengawasan Seksi Wilayah I	18.100.000	Oktober
2	Operasional Pengawasan Seksi Wilayah II	18.200.000	Maret
3	Operasional Pengawasan Seksi Wilayah III	18.100.000	April
D	Pengadaan Sarana Prasarana Penyidikan	939.000.000	
1	Sarana Prasarana Balai	130.300.000	April
2	Sarana Prasarana Seksi Wilayah I	412.400.000	Februari
3	Sarana Prasarana Seksi Wilayah II	135.200.000	April
4	Sarana Prasarana Seksi Wilayah III	261.100.000	Juni - Juli



5. Kegiatan Sarana Prasarana Penegakan Hukum LHK yang Memenuhi Standar Minimum (Rp7.716.100.000)

No.	URAIAN		ANGGARAN	WAKTU
E	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		4.417.200.000	
1	Renovasi Ruang Staff Balai	1	PAKET 230.000.000	Mei
2	Renovasi Aula Tahap III	1	PAKET 215.000.000	Maret
3	Penataan Halaman Upacara Seksi Wilayah II	1	PAKET 172.500.000	April
4	Renovasi Toilet Seksi Wilayah II	1	PAKET 57.000.000	Mei
5	Pembelian Tanah Seksi Wilayah I	1	PAKET 2.003.200.000	Mei – Agustus
6	Renovasi Ruang Kerja Seksi Wilayah I	1	PAKET 110.500.000	Mei
7	Penataan Ruang Bendahara dan Musholla Balai	1	PAKET 231.000.000	Mei
8	Renovasi Pagar Kantor Seksi Wilayah III	1	PAKET 900.000.000	Agustus
9	Pembuatan Pos Jaga Seksi Wilayah III	1	PAKET 139.000.000	Mei
10	Renovasi Ruang Rapat Kantor Seksi Wilayah III	1	PAKET 168.000.000	Juni
11	Pembuatan Tempat Wudhu dan Kanopi Seksi Wilayah III	1	PAKET 110.500.000	Juni
12	Pembuatan Ruang Tahanan Seksi Wilayah II	1	PAKET 55.000.000	Mei
13	Pemasangan Jaringan Listrik dan Air Seksi Wilayah III	1	PAKET 25.000.000	April



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan merupakan panduan pengelola dalam menjalankan pengelolaan dalam setahun ke depan. Rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga secara adaptif dapat diimplementasikan di lapangan.

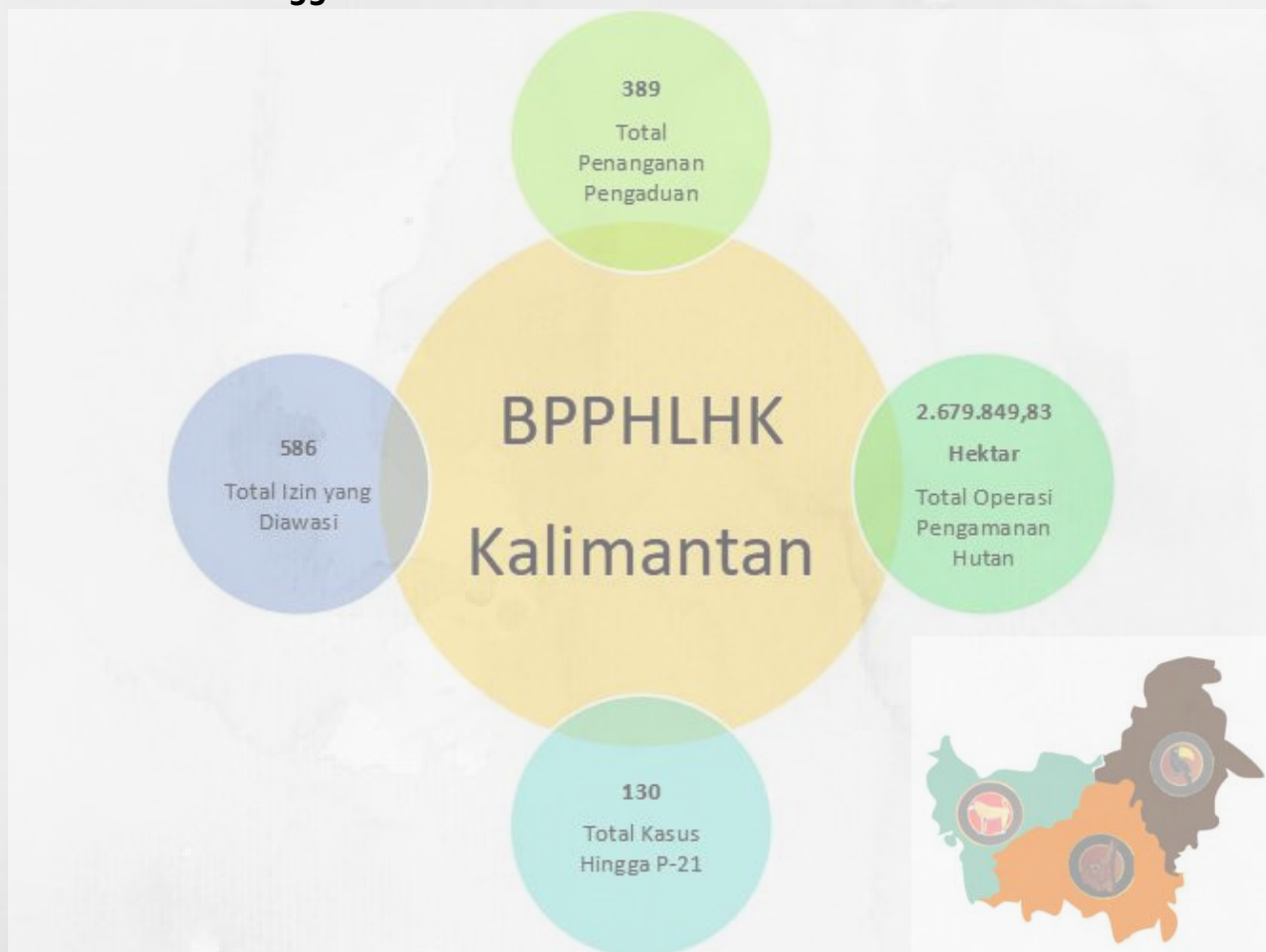
Semangat pengelolaan kolaboratif dari pihak (stakeholders) merupakan modal utama dalam mengusung sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah "Pencegahan dan Pengamanan Hutan" dan "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu disadari bahwa RENJA ini bukanlah merupakan dokumen yang sempurna dan tanpa Kelemahan. Oleh Sebab itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan RENJA tahun berikutnya.

Dengan RENJA ini diharapkan tercapai optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sehingga tercapai sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.



LAMPIRAN

Infografis 1 - Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun BPPHLHK Wilayah Kalimantan Tahun Anggaran 2017 s.d 2019



Infografis 2 - Data Terpilah Sumber Daya Manusia Tiap Seksi di BPPHLHK Kalimantan s.d 2019

	<p>BPPHLHK Kalimantan Seksi Wilayah I</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 41 Personil Polhut ● 3 Personil PPLH ● 6 Personil PPPK ● Pos Gakkum di Banjarbaru, Kalimantan Selatan
	<p>BPPHLHK Kalimantan Seksi Wilayah II</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 46 Personil Polhut ● 8 Personil PPLH ● 2 Personil Fungsional Umum ● 7 Personil PPPK ● Pos Gakkum di Tanjung Selor, Kalimantan Utara
	<p>BPPHLHK Kalimantan Seksi Wilayah III</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 47 Personil Polhut ● 4 Personil PPLH ● 1 Personil Fungsional Umum ● 6 Personil PPPK

LAMPIRAN

Anggaran Per-Kegiatan

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM WILAYAH KALIMANTAN TA 2020 ('000)	
PROG/KEG/OUTPUT/KOMPONEN	ANGGARAN/TARGET
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	1.250.000
Layanan Perkantoran	1 Layanan
Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	20.917.291
Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	375.000 Hektar
Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan	7.840.640
Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	20 Operasi
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	2.835.170
Penguatan Fungsi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	8.070.159
Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	172 Perusahaan
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	6.619.500
Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	42 Kasus P-21
Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di tangani	12.655.000
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Orang
PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	1.720.000

TOTAL PAGU ANGGARAN TA 2019
RP.61.907.760.000,-



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN**

Komplek Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jl. P.Untung Suropati, Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
Telp/Fax : 0541-2776537; e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com